

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dijelaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Pasal 1 Ayat (20), PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Carunia (2017: 119) menyebutkan bahwa PAD merupakan penerimaan daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri, yang mana semakin tinggi peran PAD dalam struktur tatanan keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. PAD yang dimiliki oleh suatu daerah akan berbeda tergantung kepada seberapa besar potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimilikinya serta tergantung pada kemampuan untuk menggali dan mengelola SDA tersebut (Fitriani, Haykal, Indrayani, & Murhaban, 2024).

Dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber ekonomi yang terdapat di wilayah daerahnya yang

berperan dalam kapasitas fiskal daerah dan dipungut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Tujuan PAD sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yakni memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD berfungsi untuk menunjang pemerintah daerah dalam melakukan pendanaan untuk menjalankan roda pemerintahannya sendiri (Fadilah & Helmayunita, 2020). Semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah tersebut dalam menanggung beban dan membiayai kewajiban belanja daerah (Marici et al., 2022). Jadi PAD memiliki tujuan untuk mendanai belanja pemerintah daerah pada saat pelaksanaan otonomi daerah.

2.1.1.3 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sama halnya dengan yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, DJPK juga mengklasifikasikan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah sebagai sumber-sumber PAD.

1. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD Pasal 1 Ayat (21) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 4 Ayat (1) dan (2)

menyebutkan bahwa terdapat dua jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak yang diterima pemerintah daerah provinsi, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Adapun pajak yang diterima pemerintah daerah Kabupaten/Kota, antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2. Retribusi Daerah

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD Pasal 1 Ayat (22) menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Pendapatan retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah berasal dari orang pribadi atau badan yang menikmati atau menggunakan pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan, sehingga objek dari retribusi adalah penyediaan

atau pelayanan barang dan/atau jasa serta pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penerimaan dari pengelolaan kekayaan tertentu yang dikelola tersendiri dari pendapatan umum daerah. DJPK menjelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya telah ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun objek pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD dan pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah adalah anggaran penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah dirinci menurut objek pendapatan, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah (Handayani, 2019). Selain itu, yang termasuk ke dalam lain-lain PAD yang sah, antara lain keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.1.4 Pengukuran Pendapatan Asli Daerah

Sejalan dengan sumber-sumber PAD sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dan DJPK, maka indikator untuk mengukur PAD yakni dengan menjumlahkan keseluruhan realisasi sumber-sumber PAD tersebut. Semakin meningkat realisasi PAD, maka akan mencerminkan bahwa pemerintah daerah tersebut semakin mampu menggali potensi yang ada untuk memperoleh pendapatan dalam membiayai kebutuhan daerah (Kesuma et al., 2022).

$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$
--

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Definisi Dana Perimbangan

Dana perimbangan ialah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Dana perimbangan merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD). Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD Pasal 1 Ayat (69), TKD berarti dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah. Dana perimbangan memiliki peran besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Fitriani et al., 2024).

Jadi, dana perimbangan merupakan bagian dana TKD yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.2.2 Tujuan Dana Perimbangan

Pengalokasian dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat pada saat pelaksanaan desentralisasi. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD menjelaskan bahwa tujuan TKD adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) serta ketimpangan antar daerah (horizontal). Selain itu, TKD bertujuan untuk mendorong kinerja dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah.

2.1.2.3 Jenis-jenis Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

1. Dana Bagi Hasil

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD Pasal 1 Ayat (70) sejalan dengan PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan TKD Pasal 1 Ayat (2) dan juga sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DBH dan DAU Pasal 1 Ayat (8), disebutkan bahwa DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, menanggulangi eksternalitas negatif bagi

daerah nonpenghasil, serta meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH berfungsi untuk mencegah ketimpangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu, DBH juga berfungsi untuk memberikan perhatian lebih terhadap daerah penghasil (Fadilah & Helmayunita, 2020).

UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 110 menetapkan pagu DBH berdasarkan realisasi penerimaan satu tahun sebelumnya dengan pengalokasian DBH yang tercantum dalam Pasal 120 dengan pembobotan 90% berdasarkan penetapan daerah penghasil dan 10% berdasarkan kinerja pemerintah daerah. Adapun dalam Pasal 111 yang sejalan dengan PP Nomor 37 Tahun 2023 Pasal 3 juga menyebutkan bahwasannya DBH terdiri atas dua jenis, yakni DBH pajak dan DBH SDA. DBH yang bersumber dari pajak antara lain DBH Pajak Penghasilan (PPh), DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sedangkan DBH yang bersumber dari SDA antara lain DBH kehutanan, DBH mineral dan batu bara, DBH minyak bumi dan gas bumi, DBH panas bumi, serta DBH perikanan.

2. Dana Alokasi Umum

UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat (71) sejalan dengan PP Nomor 37 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, dan target pembangunan nasional.

UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 125 menyebutkan bahwa pengalokasian DAU ditetapkan berdasarkan celah fiskal yang dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah. DAU memiliki sifat *block grant* yang berarti pengaplikasian dana ini sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan pengutamaan wilayahnya dalam rencana perbaikan kualitas layanan umum (Zakaria & Lathifah, 2024).

3. Dana Alokasi Khusus

DAK merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat (72) sejalan dengan PP Nomor 37 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat (4).

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 131 Ayat (3) menjelaskan bahwa DAK terdiri atas DAK fisik untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah, DAK nonfisik untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah, serta hibah kepada daerah untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu berdasarkan perjanjian antara pemerintah dan daerah. Terdapat 19 bidang yang didanai oleh DAK, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, sarana dan prasarana daerah tertinggal, listrik pedesaan, perumahan dan permukiman,

transportasi perdesaan, sarana dan prasarana kawasan perbatasan, serta keselamatan transportasi darat.

2.1.2.4 Pengukuran Dana Perimbangan

Sejalan dengan jenis-jenis Dana Perimbangan, maka indikator untuk mengukur Dana Perimbangan yakni dengan menjumlahkan keseluruhan realisasi jenis-jenis Dana Perimbangan tersebut. Besaran dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat didasarkan pada kondisi keuangan daerah. Jika potensi fiskal suatu daerah kecil, akan tetapi kebutuhan fiskalnya besar, maka akan memperoleh dana transfer yang relatif besar, begitupun sebaliknya (Susan et al., 2023).

$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$
--

2.1.3 Belanja Daerah

2.1.3.1 Definisi Belanja Daerah

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD Pasal 1 Ayat (14) menjelaskan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diartikan sebagai pengeluaran untuk membayar administrasi pemerintah, memperbaiki atau bahkan membangun struktur, menyediakan fasilitas umum dan lain-lain (Zakaria & Lathifah, 2024).

Jadi belanja daerah berarti biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik daerahnya yang terdiri dari belanja rutin, operasional, pegawai, kesehatan, pendidikan, hingga kegiatan pembangunan daerah.

2.1.3.2 Tujuan Belanja Daerah

Dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 mencantumkan bahwasannya belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan ini terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib berupa urusan yang terkait dan tidak terkait dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan berupa urusan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

2.1.3.3 Klasifikasi Belanja Daerah

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 mengklasifikasikan belanja daerah dalam empat kategori, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin atau sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari:

- a. Belanja pegawai, merupakan belanja kompensasi atas imbalan pekerjaan yang telah dilakukan yang diberikan kepada kepala atau wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN.
- b. Belanja barang dan jasa, merupakan belanja untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki manfaat kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak lain.
- c. Belanja bunga, merupakan belanja untuk membayar bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

- d. Belanja subsidi, merupakan belanja agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan badan usaha milik negara, daerah, dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan UU sehingga terjangkau oleh masyarakat.
- e. Belanja hibah, merupakan belanja yang diberikan kepada pemerintah pusat, daerah lain, BUMN, BUMD, badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain dalam UU untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan daerah.
- f. Belanja bantuan sosial, merupakan belanja untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, terdiri dari:

- a. Belanja tanah, merupakan belanja untuk perolehan tanah yang dipakai dalam kegiatan operasional daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Belanja peralatan dan mesin, merupakan belanja mencakup mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya dengan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan siap dipakai.

- c. Belanja bangunan dan gedung, merupakan belanja seluruh gedung dan bangunan untuk kegiatan operasional daerah yang siap dipakai.
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, merupakan belanja jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai oleh daerah dan siap dipakai.
- e. Belanja aset tetap lainnya, merupakan belanja aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional daerah dan siap dipakai.
- f. Belanja aset lainnya, merupakan belanja aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan disajikan di pos aset lainnya sesuai nilai tercatat.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Maksud dari keadaan darurat antara lain:

- a. Bencana alam, non-alam, sosial dan/atau kejadian luar biasa.
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik.

Adapun maksud dari keperluan mendesak antara lain:

- a. Kebutuhan pelayanan dasar yang anggarannya belum tersedia.
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.
- c. Pengeluaran di luar kendali, tidak dapat diprediksi, serta amanat UU.
- d. Pengeluaran lain yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dan/atau kepada pemerintah desa, terdiri dari:

- a. Belanja bagi hasil, merupakan belanja yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau daerah lainnya sesuai UU.
- b. Belanja bantuan keuangan, merupakan belanja yang diberikan kepada pemerintah daerah lain dalam rangka kerja sama, pemerataan keuangan, dan/atau tujuan tertentu.

2.1.3.4 Pengukuran Belanja Daerah

Sejalan dengan klasifikasi Belanja Daerah sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55, maka indikator untuk mengukur Belanja Daerah yakni dengan menjumlahkan keseluruhan realisasi klasifikasi Belanja Daerah tersebut. Menurut Rafi dan Arza (2022), kebutuhan pelayanan publik setiap daerah berbeda, sehingga pengeluaran berupa belanja daerah pun akan berbeda.

$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Operasi} + \text{Belanja Modal} + \text{Belanja Tidak Terduga} + \text{Belanja Transfer}$
--

2.1.4 *Flypaper Effect*

2.1.4.1 Definisi *Flypaper Effect*

Istilah *Flypaper Effect* diperkenalkan pertama kali oleh Courant et al. (1979) untuk mengartikulasikan pemikiran Arthur Okun (1930) yang menyatakan “*money sticks where it hits*”. *Flypaper Effect* menggambarkan penyimpangan dalam hubungan antara transfer keuangan pemerintah pusat dengan pengeluaran atau penerimaan pemerintah daerah. Ketika daerah menerima *grant*, dana tersebut

cenderung langsung mendorong kenaikan belanja, tanpa diiringi upaya untuk meningkatkan PAD (Dukumalamo, Jacob, & Hatim, 2023).

Dalam penelitiannya, Jannah dan Kurnia (2021) mengartikan *Flypaper Effect* sebagai fenomena yang terjadi ketika pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat daripada pendapatan asli dari daerahnya sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah.

Jadi, *Flypaper Effect* merupakan kondisi di mana pemerintah daerah merespon pengeluaran daerah lebih besar dengan dana transfer pusat dibandingkan dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah itu sendiri.

2.1.4.2 Karakteristik *Flypaper Effect*

Pamungkas dan Akbar (2023) menyebutkan bahwa *Flypaper Effect* dapat terjadi dalam dua versi, yakni:

- a. Merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran pengeluaran pemerintah daerah yang berlebihan.
- b. Mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

2.1.4.3 Implikasi *Flypaper Effect*

Implikasi dari *Flypaper Effect* menurut Jannah dan Kurnia (2021) antara lain dana transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan dana transfer itu sendiri. Selain itu, secara implisit terdapat beberapa akibat dari terjadinya *Flypaper Effect* ini, yakni:

- a. Menyebabkan celah fiskal (*fiscal gap*) tetap ada.
- b. Menciptakan ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan sumber PAD.
- c. Menurunkan tingkat kemandirian daerah.

2.1.4.4 Sumber Terjadinya *Flypaper Effect*

Amir (2021) menyebutkan bahwa terdapat dua teori utama dari beberapa penelitian tentang sumber munculnya *Flypaper Effect*, yakni *fiscal illusion model* (model ilusi fiskal) dan *bureaucratic model* (model birokratik).

Model ilusi fiskal pertama kali dikemukakan oleh ekonom Italia, Amilcare Puviani yang menggambarkan ilusi fiskal terjadi saat pembuat keputusan dalam suatu institusi memiliki kewenangan untuk menciptakan ilusi dalam penyusunan keuangan, yang pada akhirnya mampu mengarahkan pihak lain pada penilaian maupun tindakan tertentu. Dalam hal ini, pemerintah daerah melakukan rekayasa terhadap anggaran untuk mendorong masyarakat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam hal pembayaran pajak maupun retribusi, serta mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan transfer dalam jumlah yang lebih besar. Ilusi fiskal menjabarkan terjadinya *Flypaper Effect* ketika pemerintah daerah memanfaatkan kesalahan persepsi masyarakat dan pemerintah pusat terkait alokasi pengeluaran.

Model birokratik digagas oleh Niskanen yang menggambarkan bahwasannya birokrat berperan penting dalam pengambilan keputusan publik. Dalam hal ini, birokrat cenderung bertindak untuk memaksimalkan anggaran sebagai bentuk implikasi dari kekuasaannya. Model birokratik secara implisit mendukung *Flypaper Effect* sebagai akibat dari perilaku birokrat yang dengan

leluasa membelanjakan dana transfer daripada meningkatkan pajak, karena beranggapan bahwa program kenaikan pajak tidak disukai oleh penduduk daerah.

2.1.4.5 Pengukuran Terjadinya *Flypaper Effect*

Secara empiris, asumsi penentuan terjadinya *Flypaper Effect* fokus pada perbandingan pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah (Jannah & Kurnia, 2020). Ketika hasil statistik menunjukkan bahwa koefisien DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada koefisien PAD terhadap Belanja Daerah, maka terjadi *Flypaper Effect*.

$$\text{Flypaper Effect} = \text{Koefisien DAU} > \text{Koefisien PAD}$$

2.1.5 Kajian Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian oleh Sefti Marici, Elvin Bastian, dan Muhammad Taqi (2022) dengan judul “*Flypaper Effect* Pada Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Kabupaten Lebak dan Pandeglang Provinsi Banten Periode 2014-2019)”.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif, sedangkan PAD dan SiLPA tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Selain itu telah terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah karena koefisien DAU lebih besar daripada koefisien PAD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif, sedangkan PAD dan SiLPA tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Selain itu telah terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah karena koefisien DAU lebih besar daripada koefisien PAD.

2. Penelitian oleh Haerul Anam, Santi Yunus, Yunus Sading, Dimas Permana, dan Patta Tope (2021) dengan judul “*An Analysis of Flypaper Effect*”

Phenomenon on Regional Expenditure in District and City in Central Sulawesi".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah karena koefisien DAU lebih besar daripada koefisien PAD.

3. Penelitian oleh Naufal Muhammad Fajari Abrar, Nelly Masnila, dan Yevi Dwitayanti (2024) dengan judul "*Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Di Indonesia".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DAU, DBH, dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah karena koefisien DAU dan DBH lebih besar daripada koefisien PAD.

4. Penelitian oleh Christopher Dick-Sagoe dan Ernest Ngeh Tingum (2021) dengan judul "*Flypaper Effect of Intergovernmental Transfers and Incentives to Improve Own-Source Revenue Mobilization of Local Governments in the Central Region of Ghana*".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Central Government Transfers* (Dana Perimbangan) dan *Own Revenue* (PAD) berpengaruh positif terhadap *Total Expenditure* (Belanja Daerah). Selain itu, terjadi *Flypaper Effect* karena koefisien *Central Government Transfers* (Dana Perimbangan) lebih besar daripada koefisien *Own Revenue* (PAD).

5. Penelitian oleh Christopher Dick-Sagoe, Ernest Ngeh Tingum, Peter Asare-Nuamah, Denis N. Yuni, dan Nicholas Baidoo (2025) dengan judul “*Central Transfers and Incentives to Collect Local Revenue among the Central Region of Ghana’s Local Government Officials: Analysing the Flypaper Effect*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Central Transfers* (Dana Perimbangan), *Own Revenue* (PAD), dan *Population* (Jumlah Penduduk) berpengaruh positif, sedangkan *Distance* (Jarak dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah) tidak berpengaruh terhadap *Total Expenditure* (Belanja Daerah). Selain itu, terjadi *Flypaper Effect* karena koefisien *Central Transfers* (Dana Perimbangan) lebih besar daripada koefisien *Own Revenue* (PAD).

6. Penelitian oleh Try Firda Rahmasari, Dewi Darmastuti, dan Khalid Ardhi Nurrahman (2024) dengan judul “*Local Finance and Regional Expenditures: Is There a Flypaper Effect in Indonesia?*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Local Own-Source Revenue* (PAD), *General Allocation Fund* (DAU), *Special Allocation Fund* (DAK), dan *Revenue Sharing Fund* (DBH) tidak berpengaruh, sedangkan *Local Government Financing* (Pembiayaan Daerah) berpengaruh positif terhadap *Local Government Expenditure* (Belanja Daerah). Selain itu, tidak mengindikasikan terjadinya *Flypaper Effect*.

7. Penelitian oleh Nabila Ardyamita Septianingrum, Abdul Halim, dan Tiyas Puji Utami (2025) dengan judul “*Local Expenditure Financing Response in*

Regencies and Municipalities in Indonesia: Analysis Of The Flypaper Effect Phenomenon”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata *Capital Expenditure* (Belanja Modal) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kaya dan miskin. Sedangkan terdapat perbedaan rata-rata *Operational Expenditure* (Belanja Operasional) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kaya dan miskin. Oleh karena itu, pengujian *Flypaper Effect* dilakukan pada *Operational Expenditure* (Belanja Operasional). Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kaya tidak terjadi *Flypaper Effect*, sedangkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota miskin terjadi *Flypaper Effect* karena koefisien *General Allocation Funds* (DAU) lebih besar daripada koefisien *Local Own-Source Revenue* (PAD).

8. Penelitian oleh Shinta Kristanti, Maryono, dan Cahyani Nuswandari (2025) dengan judul “Pengaruh *Flypaper Effect* Pada Dana Perimbangan dan PAD Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan PAD dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Selain itu terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah karena koefisien Dana Perimbangan lebih besar daripada koefisien PAD.

9. Penelitian oleh Aril Yanuar Lisprastyo Wibowo dan Sugeng Widodo (2023) dengan judul “Proporsi Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah

Terhadap Belanja Daerah Serta Menunjukkan Ada Tidaknya Flypaper Effect di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2017-2019”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DAU dan PAD berpengaruh, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Secara simultan, DAU, DAK, dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu telah terjadi *Flypaper Effect* karena nilai DAU lebih besar daripada nilai PAD ($DAU > PAD$).

10. Penelitian oleh Haris Fadilah dan Nayang Helmayunita (2020) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia”.

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial DAU, DBH, dan PAD berpengaruh positif, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu telah terjadi fenomena *Flypaper Effect* karena secara simultan, pengaruh DAU, DAK, DBH terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.

11. Penelitian oleh Rahmat Nur Rafi dan Fefri Indra Arza (2022) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, PAD, DAU, DAK, dan SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain

itu telah terjadi fenomena *Flypaper Effect* karena secara simultan, pengaruh DAU, DAK, dan SiLPA terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.

12. Penelitian oleh Hanna Rachmani Allya dan Farida Rahmawati (2023) dengan judul “*Flypaper Effect* Pada Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DAU dan PAD berpengaruh positif signifikan, sedangkan DAK berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah. Selain itu tidak terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah karena koefisien PAD lebih besar daripada koefisien DAU maupun DAK.

13. Penelitian oleh Marini Wulandari dan Nurhayati (2025) dengan judul “Fenomena *Flypaper Effect* Pada 62 Kabupaten Tertinggal di Indonesia”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif signifikan, sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah karena PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

14. Penelitian oleh Nurdiah Anjas Kesuma, Kartika Rachma Sari, Darul Amri, dan Masnoni (2022) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan secara simultan, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Kemudian PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Selain itu terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah karena koefisien DAU lebih besar daripada koefisien PAD.

15. Penelitian oleh Vina Octaviana (2021) dengan judul “*Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Selain itu tidak terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah karena koefisien PAD lebih besar daripada koefisien DAU.

16. Penelitian oleh Fitriani, Muhammad Haykal, Murhaban, dan Indrayani (2024) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD, DAK, dan DBH tidak berpengaruh, sedangkan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu terjadi *Flypaper Effect* pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021.

17. Penelitian oleh Helmi Melda dan Efrizal Syofyan (2020) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif signifikan, sedangkan DBH tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah karena secara simultan koefisien Dana Perimbangan lebih besar daripada koefisien PAD.

18. Penelitian oleh Rizki Ali Zakaria dan Nurul Lathifah (2024) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2022”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DAU tidak berpengaruh, sedangkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara simultan, DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu tidak terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah karena koefisien DAU lebih kecil daripada koefisien PAD.

19. Penelitian oleh Nanik Kustianingsih, Andriana, dan Oktaviani Ari Wardhaningrum (2022) dengan judul “*Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu terjadi *Flypaper Effect*

pada Belanja Daerah karena koefisien DAU lebih besar daripada koefisien PAD.

20. Penelitian oleh Arum Indrasari dan Recka Kholvieyana (2021) dengan judul “*Flypaper Effect* dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Khususnya Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DAU berpengaruh, sedangkan PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah karena koefisien DAU lebih besar daripada koefisien PAD. Kemudian pada tahun sebelumnya tidak terjadi *Flypaper Effect* karena DAU dan PAD pada tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

21. Penelitian oleh Regina Triyansi Susan, Yosefina Andia Dekrita, dan Konstantinus Pati Sanga (2023) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Keterjadian *Flypaper Effect* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018-2022”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Secara simultan PAD dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu telah terjadi *Flypaper Effect* karena koefisien Dana Perimbangan lebih besar daripada koefisien PAD.

22. Penelitian oleh Putu Etha Naraswari Wira dan Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi (2023) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* pada Pengaruh Dana

Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2019-2021)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DAK, PAD, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu tidak terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah karena koefisien DAK dan SiLPA lebih kecil daripada koefisien PAD.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sefti Marici, Elvin Bastian, dan Muhammad Taqi, 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan Pandeglang di Provinsi Banten	- Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. - Variabel Independen: PAD. - Variabel Dependen: Belanja Daerah. - Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. - Data: Data Panel.	- Variabel Independen: DAU, DAK, DBH, dan SiLPA. - Penentuan sampel: Sampel Jenuh. - Subjek dan Periode Penelitian.	Secara parsial DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif, sedangkan PAD dan SiLPA tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Selain itu telah terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah karena koefisien DAU lebih besar daripada koefisien PAD.	Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa. Vol. 07, No. 01 (2022). p-ISSN: 2548 7078. e-ISSN: 2656-4726. Universitas Sultan Ageng Tritayasa.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Haerul Anam, Santi Yunus, Yunus Sading, Dimas Permana, dan Patta Tope, 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah	• Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. • Variabel Independen: PAD. • Variabel Dependen: Belanja Daerah. • Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. • Data: Data Panel.	• Variabel Independen: DAU, DAK, dan DBH. • Penentuan sampel: Sampel Jenuh. • Subjek dan Periode Penelitian.	Secara parsial dan simultan PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah karena koefisien DAU lebih besar daripada koefisien PAD.	<i>Advances in Social Science, Education and Humanities Research</i> . Vol. 674 (2021) Universitas Tadulako Palu (Atlantis Press SARL).
3.	Naufal Muhammad Fajari Abrar, Nelly Masnila, dan Yeve Dwitayanti, 2024 Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	• Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. • Variabel Independen: PAD. • Variabel Dependen: Belanja Daerah. • Penentuan sampel: <i>Purposive sampling</i>. • Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. • Data: Data Panel. • Subjek Penelitian.	• Variabel Independen: DAU dan DBH. • Periode Penelitian.	Secara parsial DAU, DBH, dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah karena koefisien DAU dan DBH lebih besar daripada koefisien PAD.	Jurnal MANEKSI Vol. 13, No. 4, (2024) e-ISSN: 2597-4599. p-ISSN: 2302-9560. Politeknik Negeri Sriwijaya.
4.	Christopher Dick-Sagoe dan Ernest Ngeh Tingum, 2021 <i>Central Region of</i>	• Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. • Variabel Independen: <i>Own Revenue</i> (PAD) dan <i>Central Government</i>	• Subjek dan Periode Penelitian.	<i>Central Government Transfers</i> (Dana Perimbangan) dan <i>Own Revenue</i> (PAD) berpengaruh positif terhadap <i>Total Expenditure</i>	<i>Open Journal of Social Sciences</i> (2021) e-ISSN: 2327-5960. p-ISSN: 2327-5952

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Ghana's local government officials</i>	<i>Transfers</i> (Dana Perimbangan) • Variabel Dependen: <i>Total Expenditure</i> (Belanja Daerah). • Penentuan sampel: <i>Purposive sampling</i>. • Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. • Data: Data Panel.		(Belanja Daerah). Selain itu, terjadi <i>Flypaper Effect</i> karena koefisien <i>Central Government Transfers</i> (Dana Perimbangan) lebih besar daripada koefisien <i>Own Revenue</i> (PAD).	<i>Scientific Research Publishing</i> (SCIRP).
5.	Christopher Dick-Sagoe, Ernest Ngeh Tingum, Peter Asare-Nuamah, Denis N. Yuni, dan Nicholas Baidoo, 2025 <i>Central Region of Ghana's local government officials</i>	• Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. • Variabel Independen: <i>Own Revenue</i> (PAD) dan <i>Central Transfers</i> (Dana Perimbangan) • Variabel Dependen: <i>Total Expenditure</i> (Belanja Daerah). • Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. • Data: Data Panel.	• Variabel Independen: <i>Population</i> (Jumlah Penduduk) dan <i>Distance</i> (Jarak dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah). • Penentuan sampel: Sampel Jenuh. • Subjek dan Periode Penelitian.	<i>Central Transfers</i> (Dana Perimbangan), <i>Own Revenue</i> (PAD), dan <i>Population</i> (Jumlah Penduduk) berpengaruh positif, sedangkan <i>Distance</i> (Jarak dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah) tidak berpengaruh terhadap <i>Total Expenditure</i> (Belanja Daerah). Selain itu, terjadi <i>Flypaper Effect</i> karena koefisien <i>Central Transfers</i> (Dana Perimbangan) lebih besar daripada koefisien <i>Own Revenue</i> (PAD).	<i>Humanities and Social Sciences Communications</i> (2025) e-ISSN: 2662-9992. <i>University of South Africa</i> .
6.	Try Firda Rahmasari, Dewi	• Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>.	• Variabel Independen: <i>General</i>	<i>Local Own-Source Revenue</i> (PAD), <i>General</i>	<i>KnE Social Sciences</i> ,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Darmastuti, dan Khalid Ardhi Nurrahman, 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia	• Variabel Independen: <i>Local Own-Source Revenue</i> (PAD). • Variabel Dependen: <i>Local Government Expenditure</i> (Belanja Daerah). • Penentuan sampel: <i>Purposive sampling</i>. • Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda.	<i>Allocation Fund</i> (DAU), <i>Special Allocation Fund</i> (DAK), <i>Revenue Sharing Fund</i> (DBH), dan <i>Local Government Financing</i> (Pembiayaan Daerah). • Data: <i>Time Series</i>. • Subjek dan Periode Penelitian.	<i>Allocation Fund</i> (DAU), <i>Special Allocation Fund</i> (DAK), dan <i>Revenue Sharing Fund</i> (DBH) tidak berpengaruh, sedangkan <i>Local Government Financing</i> (Pembiayaan Daerah) berpengaruh positif terhadap <i>Local Government Expenditure</i> (Belanja Daerah). Selain itu, tidak mengindikasikan terjadinya <i>Flypaper Effect</i> .	<i>The 3rd Jakarta Economic Sustainability International Conference</i> (JESICA) (2024)
7.	Nabila Ardyamita Septianingrum, Abdul Halim, dan Tiyas Puji Utami, 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota kaya dan miskin di Indonesia	• Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. • Variabel Independen: <i>Local Own-Source Revenue</i> (PAD). • Variabel Dependen: Belanja Daerah (<i>Capital dan Operational Expenditure</i>). • Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. • Data: Data Panel.	• Variabel Independen: <i>General Allocation Funds</i> (DAU), <i>Special Allocation Funds</i> (DAK), dan <i>Revenue-Sharing Funds</i> (DBH). • Penentuan sampel: <i>Stratified random sampling</i>. • Subjek dan Periode Penelitian.	Tidak terdapat perbedaan rata-rata <i>Capital Expenditure</i> (Belanja Modal) pada Kabupaten/Kota kaya dan miskin. Sedangkan terdapat perbedaan rata-rata <i>Operational Expenditure</i> (Belanja Operasional) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kaya dan miskin. Oleh karena itu, pengujian <i>Flypaper Effect</i> dilakukan pada <i>Operational Expenditure</i> (Belanja Operasional). Kabupaten/Kota kaya tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i> ,	<i>Journal of Accounting and Investment</i> Vol. 26, No. 1, (2025) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				sedangkan pada Kabupaten/Kota miskin terjadi <i>Flypaper Effect</i> karena koefisien <i>General Allocation Funds</i> (DAU) lebih besar daripada koefisien <i>Local Own-Source Revenue</i> (PAD).	
8.	Shinta Kristanti, Maryono, dan Cahyani Nuswandari, 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	• Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. • Variabel Independen: PAD. • Variabel Dependen: Belanja Daerah. • Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. • Data: Data Panel.	• Variabel Independen: DAU, DAK, dan DBH. • Penentuan sampel: Sampel Jenuh. • Subjek dan Periode Penelitian.	Secara parsial dan simultan PAD dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Selain itu terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah karena koefisien Dana Perimbangan lebih besar daripada koefisien PAD.	<i>Journal of Economic, Business and Accounting</i> Vol. 8, No. 3, (2025) e-ISSN: 2597-5234. Universitas Stikubank Semarang.
9.	Aril Yanuar Lisprastyo Wibowo dan Sugeng Widodo, 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	• Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. • Variabel Independen: PAD. • Variabel Dependen: Belanja Daerah. • Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. • Data: Data Panel.	• Variabel Independen: DAU dan DAK. • Penentuan sampel: Sampel Jenuh. • Subjek dan Periode Penelitian.	Secara parsial DAU dan PAD berpengaruh, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Secara simultan, DAU, DAK, dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu telah terjadi <i>Flypaper Effect</i> karena nilai DAU lebih besar daripada nilai PAD (DAU > PAD).	Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 05, No. 2 (2023). e-ISSN: 2745-6366. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Haris Fadilah dan Nayang Helmayunita 2020 Pemerintah Provinsi di Indonesia	• Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. • Variabel Independen: PAD. • Variabel Dependen: Belanja Daerah. • Penentuan sampel: <i>Purposive sampling</i>. • Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. • Data: Data Panel. • Subjek Penelitian.	• Variabel Independen: DAU, DAK, dan DBH. • Periode Penelitian.	Secara parsial DAU, DBH, dan PAD berpengaruh positif, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu telah terjadi fenomena <i>Flypaper Effect</i> karena secara simultan, pengaruh DAU, DAK, DBH terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2, No 3, Seri C, (2020) e-ISSN: 2656-3649. Universitas Negeri Padang.
11.	Rahmat Nur Rafi dan Fefri Indra Arza, 2022 Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat	• Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. • Variabel Independen: PAD. • Variabel Dependen: Belanja Daerah. • Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. • Data: Data Panel.	• Variabel Independen: DAU, DAK, dan SiLPA. • Penentuan sampel: Sampel Jenuh. • Subjek dan Periode Penelitian.	Secara parsial, PAD, DAU, DAK, dan SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu telah terjadi fenomena <i>Flypaper Effect</i> karena secara simultan, pengaruh DAU, DAK, dan SiLPA terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 5, No 1, (2023) e-ISSN: 2656-3649. Universitas Negeri Padang.
12.	Hanna Rachmani Allya dan Farida Rahmawati, 2023 Pemerintah Kabupaten/ Kota di	• Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. • Variabel Independen: PAD. • Variabel Dependen: Belanja Daerah.	• Variabel Independen: DAU dan DAK. • Penentuan sampel: Sampel Jenuh.	Secara parsial DAU dan PAD berpengaruh positif signifikan, sedangkan DAK berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah. Selain itu tidak terjadi <i>Flypaper</i>	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 5, No 1, (2023) e-ISSN: 2656-3649. Universitas Negeri Padang.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Jawa Timur	• Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. • Data: Data Panel.	• Subjek dan Periode Penelitian.	<i>Effect</i> pada Belanja Daerah karena koefisien PAD lebih besar daripada koefisien DAU maupun DAK.	
13.	Marini Wulandari dan Nurhayati, 2025 62 Pemerintah Kabupaten Tertinggal di Indonesia	• Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. • Variabel Independen: PAD. • Variabel Dependen: Belanja Daerah. • Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. • Data: Data Panel.	• Variabel Independen: DAU, DAK, dan DBH. • Penentuan sampel: Sampel Jenuh. • Subjek dan Periode Penelitian.	Secara parsial DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif signifikan, sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu terjadi fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah karena PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Ekonomi: <i>Journal of Ecoomic</i> Vol. 16, No 10,(2025) e-ISSN: 2528-326X p-ISSN: 2087-8133. Universitas Trisakti.
14.	Nurdiah Anjas Kesuma, Kartika Rachma Sari, Darul Amri, dan Masnoni, 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan	• Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. • Variabel Independen: PAD. • Variabel Dependen: Belanja Daerah. • Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. • Data: Data Panel.	• Variabel Independen: DAU, dan DAK. • Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. • Penentuan sampel: Sampel Jenuh. • Subjek dan Periode Penelitian.	Secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara simultan, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Kemudian PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Selain itu terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah karena koefisien DAU	Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi dan Sistem Informasi (EKSISTA NSI) Vol. 11, No. 1, (2022) e-ISSN: 2776-074X p-ISSN: 2085-2401. Politeknik Negeri Sriwijaya.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				lebih besar daripada koefisien PAD.	
15.	Vina Octaviana, 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau	- Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. - Variabel Independen: PAD. - Variabel Dependen: Belanja Daerah. - Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. - Data: Data Panel.	- Variabel Independen: DAU. - Penentuan sampel: Sampel Jenuh. - Subjek dan Periode Penelitian.	Secara parsial DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Selain itu tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah karena koefisien PAD lebih besar daripada koefisien DAU.	Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol. 22, No. 4 (2021) e-ISSN: 2685-3183. p-ISSN: 1907-3593. Universitas Sam Ratulangi.
16.	Fitriani, Muhammad Haykal, Murhaban, dan Indrayani, 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh	- Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. - Variabel Independen: PAD. - Variabel Dependen: Belanja Daerah. - Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. - Data: Data Panel.	- Variabel Independen: DAU, DAK, dan DBH. - Penentuan sampel: Sampel Jenuh. - Subjek dan Periode Penelitian.	Secara parsial PAD, DAK, dan DBH tidak berpengaruh, sedangkan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021.	Jurnal Akuntansi Malikussaleh Vol. 3, No. 1 (2024) e-ISSN: 2962-6927. Universitas Malikussaleh.
17.	Helmi Melda dan Efrizal Syofyan, 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat	- Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. - Variabel Independen: PAD. - Variabel Dependen: Belanja Daerah. - Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda.	- Variabel Independen: DAU, DAK, dan DBH. - Penentuan sampel: Sampel Jenuh. - Subjek dan Periode Penelitian.	Secara parsial DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif signifikan, sedangkan DBH tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah karena secara simultan koefisien Dana	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2, No. 2, Seri C (2020) e-ISSN: 2656-3649. Universitas Negeri Padang.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		• Data: Data Panel.		Perimbangan lebih besar daripada koefisien PAD.	
18.	Rizki Ali Zakaria dan Nurul Lathifah, 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur	• Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. • Variabel Independen: PAD. • Variabel Dependen: Belanja Daerah. • Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. • Data: Data Panel.	• Variabel Independen: DAU. • Penentuan sampel: Sampel Jenuh. • Subjek dan Periode Penelitian.	Secara parsial DAU tidak berpengaruh, sedangkan PAD positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara simultan, DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah karena koefisien DAU lebih kecil daripada koefisien PAD.	JUREMI: Jurnal Riset Ekonomi Vol. 3, No. 5 (2024) e-ISSN: 2798-6535. p-ISSN: 2798-6489. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
19.	Nanik Kustianingsih, Andriana, dan Oktaviani Ari Wardhaningrum, 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur	• Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. • Variabel Independen: PAD. • Variabel Dependen: Belanja Daerah. • Penentuan sampel: <i>Purposive sampling</i>. • Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. • Data: Data Panel.	• Variabel Independen: DAU. • Subjek dan Periode Penelitian.	Secara parsial PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah karena koefisien DAU lebih besar daripada koefisien PAD.	<i>Financial:</i> Jurnal Akuntansi Vol. 8, No. 1 (2022) e-ISSN: 2686-2581. p-ISSN: 2502-4574. Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung.
20.	Arum Indrasari dan Recka	• Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>.	• Variabel Independen: DAU.	Secara parsial DAU berpengaruh, sedangkan PAD	Jurnal Riset Akuntansi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kholvieyana 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau	• Variabel Independen: PAD. • Variabel Dependen: Belanja Daerah. • Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. • Data: Data Panel.	• Penentuan sampel: Sampel Jenuh. • Subjek dan Periode Penelitian.	tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah karena koefisien DAU lebih besar daripada koefisien PAD. Kemudian pada tahun sebelumnya tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i> karena DAU dan PAD pada tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.	dan Auditing Vol. 8, Edisi 2 (2021) e-ISSN: 2746-9956. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
21.	Regina Triyansi Susan, Yosefina Andia Dekrita, dan Konstantinus Pati Sanga, 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka	• Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. • Variabel Independen: PAD dan Dana Perimbangan. • Variabel Dependen: Belanja Daerah. • Penentuan sampel: <i>Purposive sampling</i>. • Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda.	• Data: <i>Time Series</i>. • Subjek dan Periode Penelitian.	Secara parsial PAD dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Secara simultan PAD dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu telah terjadi <i>Flypaper Effect</i> karena koefisien Dana Perimbangan lebih besar daripada koefisien PAD.	Jurnal Bisnis dan Manajemen, <i>Student Scientific Creativity Journal</i> (SSCJ). Vol. 1, No. 5 (2023). e-ISSN: 2985-3753. p-ISSN: 2985-3761. Universitas Nusa Nipa Maumere.
22.	Putu Etha Naraswari Wira dan Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, 2023 Pemerintah Daerah	• Keterjadian <i>Flypaper Effect</i>. • Variabel Independen: PAD. • Variabel Dependen: Belanja Daerah.	• Variabel Independen: DAK dan SiLPA. • Periode Penelitian.	Secara parsial DAK, PAD, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja	Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 12, No. 3 (2023) e-ISSN: 2686-1941. p-ISSN: 2337-537X

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi di Indonesia	• Penentuan sampel: <i>Purposive sampling</i>. • Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda. • Data: Data Panel. • Subjek Penelitian.		Daerah karena koefisien DAK dan SiLPA lebih kecil daripada koefisien PAD.	Universitas Pendidikan Ganesha.

Riska Putri Aulia (2026)

Analisis *Flypaper Effect* dan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah
(Studi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2024)

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran alur berpikir peneliti dalam menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti berdasarkan teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran ini dibuat untuk mengetahui apakah tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh atau tidak terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, serta untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi terjadinya *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah. Melalui kerangka pemikiran tersebut, penelitian menjadi lebih terarah karena menunjukkan hubungan logis antar variabel dan menjadi landasan dalam penyusunan hipotesis penelitian.

Teori *stewardship* atau teori pelayanan merupakan teori yang mendukung penelitian ini. Teori *stewardship* dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) sebagai teori yang menjelaskan bahwa manajer tidak memiliki kebutuhan secara

pribadial melainkan lebih menitikberatkan pada kebutuhan *principal* (Subroto & Endaryati, 2024). Menurut Pratiwi et al. (2018), teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif berperan sebagai *steward* yang termotivasi agar bertindak sesuai keinginan *principal*.

Dalam konteks pemerintah daerah, aparatur pemerintah berperan sebagai *steward* yang menerima amanah dari masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola sumber daya publik dengan tanggung jawab yang tinggi, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan berlandaskan prinsip *stewardship*, pemerintah akan bekerja semaksimal mungkin mengemban amanah demi tercapainya tujuan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat (Fitriani et al., 2024).

Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan PAD dan mengelola dana perimbangan secara efisien untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam teori *stewardship*, pemerintah daerah mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat dengan menunjukkan tanggung jawab atas kinerjanya, meningkatkan sumber daya daerah, mempertanggungjawabkan keuangan yang telah diamanahkan, meningkatkan kekayaan daerah, serta menerima aspirasi yang diberikan masyarakat (Indrasari & Kholvieyana, 2021).

Di samping itu, kebijakan desentralisasi berupa penyerahan urusan pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, aparatur pemerintah daerah diasumsikan mampu bertindak sebagai *steward* yang bertanggung jawab atas sumber daya dan wewenang yang diberikan. Dalam konsep desentralisasi fiskal, berbagai cara akan dilakukan

pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerahnya sebagai upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publik (Susan et al., 2023). Jika pelayanan publik terpenuhi, maka kesejahteraan masyarakat selaku *principal* akan tercipta sesuai dengan tujuan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Namun, ketika belanja daerah lebih banyak direspon oleh dana transfer dibandingkan PAD, muncul *Flypaper Effect* yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, teori ini menjadi dasar pemikiran bahwa semakin kuat tanggung jawab dan orientasi pelayanan pemerintah daerah, semakin optimal pula pengelolaan keuangan daerah dan efektivitas belanja publik. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat. Teori ini menitikberatkan pada tanggung jawab manajer entitas dalam mengolah aset entitas dengan memperhatikan pada kebutuhan *principal* (Subroto & Endaryati, 2024).

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk belanja daerah adalah dengan menjumlahkan jenis belanja daerah yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sesuai klasifikasi belanja daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemahaman mengenai belanja daerah menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah digunakan untuk membiayai berbagai administrasi pemerintah, memperbaiki ataupun membangun struktur, menyediakan fasilitas umum, dan pengeluaran lain yang tidak dapat terelakkan (Zakaria & Lathifah, 2024).

Salah satu komponen penting dalam struktur keuangan daerah adalah PAD yang memiliki kaitan erat dengan belanja daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. PAD menjadi indikator kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan. Dengan PAD yang meningkat, maka pemerintah daerah dapat menekan ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Melda & Syofyan, 2020).

Secara teoritis, PAD merupakan salah satu sumber utama untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran belanja daerah. PAD memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Ketika PAD mengalami peningkatan, maka pemerintah daerah memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam merancang anggaran dan memperluas belanja daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat realisasi PAD, semakin besar pula alokasi untuk belanja daerah (Fadilah & Helmayunita, 2020).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakaria & Lathifah (2024) bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwasannya tingkat PAD mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kegiatan dan proyek pembangunan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Wira & Dewi (2023) mengemukakan bahwa pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi dapat mengalokasikan anggaran belanjanya dengan leluasa tanpa bergantung pada dana transfer. Dalam penelitian Kesuma et. al (2022), pengaruh positif ini membuktikan bahwa pemerintah daerah mampu menggali potensi daerahnya untuk memperoleh pendapatan dalam membiayai kebutuhan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Melda & Syofyan (2020), Fadilah & Helmayunita (2020), Octaviana (2021), Anam et. al (2021), Kristanti et. al (2025), Kustianingsih et. al (2022), Rafi & Arza (2022), Wibowo & Widodo (2023), Allya & Rahmawati (2023), dan Abrar et. al (2024) juga menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan PAD terhadap belanja daerah yang menunjukkan semakin tinggi jumlah PAD, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Meskipun secara teoritis PAD berpotensi memberikan pengaruh positif terhadap belanja daerah, penelitian oleh Susan et. al (2023) menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan realisasi dan pertumbuhan PAD yang begitu kecil, serta ruang lingkup penelitian hanya mencakup satu pemerintah daerah sehingga variasi kemampuan PAD di wilayah lain tidak tergambar.

Selain itu, dalam rangka memperkuat kapasitas keuangan daerah, pemerintah pusat juga memberikan dana transfer sebagai tambahan penerimaan daerah. Tujuan utama dana transfer adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah dan mendukung pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Melalui dana perimbangan, pemerintah pusat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan harapan kesenjangan fiskal tidak terjadi antar daerah (Susan et al., 2023). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menjumlahkan jenis-jenis dana perimbangan, antara lain DBH, DAU, dan DAK.

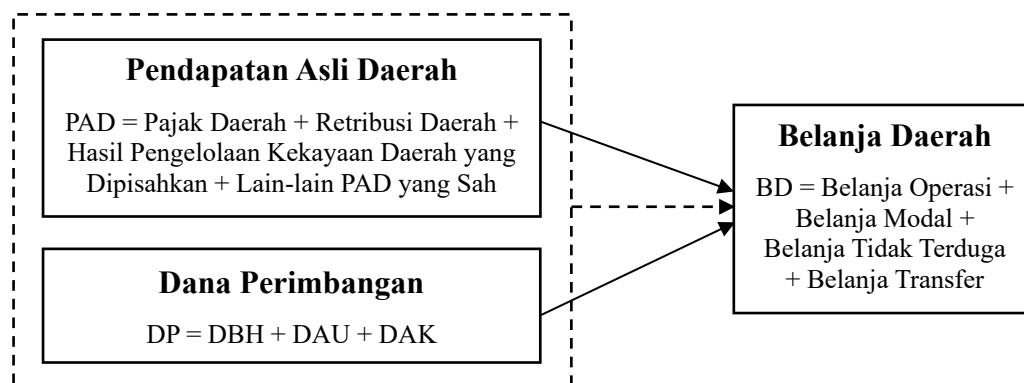
Penelitian yang dilakukan oleh Kristanti et al. (2025) mengungkapkan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah,

yang mana terjadinya peningkatan belanja daerah disebabkan karena meningkatnya dana perimbangan. Selain itu, hal ini berarti pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tersebut masih belum mandiri dalam mengelola keuangan lokalnya karena masih bergantung pada transfer pusat. Penelitian oleh Fadilah & Helmayunita (2020), Anam et. al (2021), Marici et al. (2022), dan Wulandari & Nurhayati (2025) juga menyebutkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Meskipun dana perimbangan berpotensi memberikan dorongan positif terhadap belanja daerah, hasil penelitian Susan et. al (2023) menunjukkan tidak adanya pengaruh. Hal ini dikarenakan pola alokasi belanja yang tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh fluktuasi transfer, ditambah ruang lingkup penelitian yang terbatas pada satu pemerintah daerah sehingga distribusi dan respon belanja yang lebih beragam antarwilayah tidak tercermin dalam analisis tersebut.

Besarnya belanja daerah tidak terlepas dari besaran PAD dan dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah. Belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan berbagai layanan publik lainnya. Dengan demikian, tingkat belanja daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaannya. Di mana, semakin tinggi tingkat belanja daerah, maka semakin tinggi pula dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah (Wira & Dewi, 2023).

Berdasarkan berbagai kajian literatur, ditemukan bahwa respon pemerintah daerah terhadap sumber penerimaan berbeda-beda. Dalam banyak penelitian, pemerintah daerah seringkali menggunakan dana perimbangan terutama yang tidak bersyarat untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Hal ini didasarkan oleh anggapan bahwa penggunaan DAU tidak diberi syarat tertentu dalam penggunaannya, sehingga pemerintah daerah semakin mempunyai keleluasaan untuk melakukan Belanja Daerah yang bersumber dari DAU (Marici et al., 2022). Pola perilaku tersebut dikenal sebagai *Flypaper Effect*, yang menggambarkan perilaku asimetris pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan. Artinya, pemberian dana perimbangan yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh pemerintah daerah (Susan et al., 2023). *Flypaper Effect* dalam penelitian ini tidak diperlakukan sebagai variabel independen, melainkan sebagai fenomena fiskal yang diidentifikasi melalui perbandingan antara besarnya pengaruh dana transfer yang diprosikan dengan DAU dan pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Indikasi terjadinya fenomena *Flypaper Effect* terlihat ketika pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah (Kesuma et al., 2022).

Berdasarkan judul penelitian “Analisis *Flypaper Effect* dan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2020–2024)”, maka disusunlah kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

-----> = Secara Simultan

————> = Secara Parsial

Berdasarkan gambar 2.1 penulis mengidentifikasi tiga variabel yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah. Apabila PAD dan Dana Perimbangan meningkat, maka akan mengakibatkan Belanja Daerah yang juga meningkat. *Flypaper Effect* tidak disimbolkan dalam kerangka pemikiran karena merupakan sebuah fenomena fiskal yang muncul ketika respon dari pemerintah daerah lebih besar terhadap DAU dalam Belanja Daerah.

2.3 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Sahir (2021: 26) adalah prediksi awal penelitian berupa hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi hipotesis berarti dugaan sementara dari rumusan masalah yang selanjutnya dijadikan dasar

untuk penelitian lebih lanjut. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2024.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2024.
3. Dana Perimbangan berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2024.
4. Terjadi *Flypaper Effect* pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2024.